

**TANGGUNG JAWAB PERDATA AKUNTAN PUBLIK TERHADAP  
KECURANGAN YANG TERDAPAT DALAM LAPORAN KEUANGAN  
AUDITAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TETANG AKUNTAN PUBLIK**

Swardi Johnson<sup>1</sup> dan Veri Antoni<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab perdata Akuntan Publik terhadap kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan auditan ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik serta untuk mengetahui pihak yang dapat menuntut pertanggungjawaban secara perdata kepada Akuntan Publik apabila terdapat kecurangan dalam laporan keuangan auditan Perseroan Terbuka.

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang ditunjang dengan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian pustaka dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pihak yang dituju dalam laporan auditor independen dan untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan Akuntan Publik terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntan Publik memiliki tanggung jawab secara perdata terhadap opini audit atas laporan keuangan auditan. Tanggung jawaban atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan Terbuka. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa seluruh pengguna laporan keuangan auditan Perseroan Terbuka yang mengalami kerugian atas kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan auditan dapat menuntut pertanggungjawaban secara perdata kepada Akuntan Publik apabila Akuntan Publik melakukan perbuatan melawan hukum karena kesengajaan atau kelalaian dalam memberikan jasa auditnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Kepatuhan dan pelaksanaan Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi dan pembuatan kertas kerja yang digunakan sebagai basis dari opini audit atas laporan keuangan merupakan kewajiban hukum Akuntan Publik berdasarkan Undang-Undang Tentang Akuntan Publik. Pelaksanaan kewajiban hukum merupakan dasar perlindungan hukum terhadap Akuntan Publik dalam memberikan jasa audit kepada Perseroan Terbuka.

**Kata Kunci** : Akuntan Publik, Tanggung Jawab Perdata, Perseroan Terbuka.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Veri Antoni, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## CIVIL RESPONSIBILITY OF THE PUBLIC ACCOUNTANT ON FRAUD IN THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS BASED ON LAW OF REPUBLIC INDONESIA NUMBER 5 YEAR 2011 ON PUBLIC ACCOUNTAT

Swardi Johnson<sup>1</sup> and Veri Antoni<sup>2</sup>

### ABSTRACT

This study aims to understand and review civil responsibility of the Public Accountant on fraud in the audited financial statements based on Law of Republic Indonesia Number 5 Year 2011 on Public Accountant and also to understand parties which can sue the Public Accountant for a civil responsibility in the existence of fraud in the audited financial statements of a Public Company.

This research is library research which supported with field research. The data collected from library research was analysed with qualitative descriptive method. The field research was performed to obtain information regarding appropriate addressee in the independent auditors' report and to obtain a view of Public Accountants' compliance on the requirements of the regulations.

Results of this research disclosed that Public Accounts have civil responsibility for the opinion on the audited financial statements. Management of the Public Company is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements.. This research also concluded that all users of audited financial statements of a Public Company which suffered loss due to fraud in the audited financial statement can sue the Public Accountant for a civil responsibility if the Public Accountant commits a tort by intent or negligence in providing audit service in accordance with the provisions of Article 1365 of Indonesian Civil Code.

The compliance and implementation of Professional Standard of the Public Accountant and Professional Ethic Code and preparation of working parper as the basis for audit opinion on the financial statements are the legal obligation of Public Accountant under the Law of Public Accountants. Implementation of the legal obligation is the basis of legal protection for the Public Accountant in providing audit services to the Public Company.

**Key Words :** *Public Accountant, Civil Responsibility, Public Company*

---

<sup>1</sup> Student of Master of Laws, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Veri Antoni, Lecturer of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.